

**Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan PAUD
(Studi Kasus di PAUD Bukit Sion Desa Wangkar Weli, Kecamatan Lamba Leda Timur,
Kabupaten Manggarai Timur)**

Lidia Erstiana Ajeng¹⁾, Ika Devy Pramudiana²⁾, Nihayatus Sholichah³⁾

^{1) 2) 3)} Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya
Email: lityaajeng16@gmail.com

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan didorong untuk meningkatkan kemandiriannya dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Jadi pemberdayaan masyarakat lebih menekankan pada suatu proses. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori evaluasi kebijakan publik menurut William N Dunn meliputi efektifitas, efesiensi, kecukupan, perataan, responsifitas, dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian menggunakan teori William N. Dunn di PAUD Bukit Sion Desa Wangkar Weli, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dikatakan masih belum berjalan maksimal dikarenakan menemukan beberapa kendala dalam program pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan anak usia dini yaitu kurangnya tenaga pengajar yang sesuai jurusannya dan dibutuhkan pelatihan profesi guru PAUD untuk meningkatkan kualitas dalam mengajar. Tidak hanya itu, kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya pendidikan anak usia dini sebelum masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya dan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki PAUD Bukit Sion seperti lemari yang digunakan tidak dapat dijangkau anak, kurangnya dana sehingga keterbatasan untuk membeli sarana dan prasarana untuk sekolah seperti: meja, kursi, dan alat-alat bermain anak PAUD, ruang kelas yang relatif sempit sehingga anak kurang leluasa dalam melakukan aktivitas di dalam kelas.

Kata Kunci: Evaluasi Program, Pemberdayaan, Pendidikan PAUD

Abstract

Community empowerment is a process where communities, especially those who lack access to development resources, are encouraged to increase their independence in developing their lives. So community empowerment places more emphasis on a process. Early Childhood Education (PAUD) is a level of education before the basic education level which is a coaching effort aimed at children from birth to six years of age which is carried out through providing educational stimuli to help physical and spiritual growth and development so that children are ready to enter further education, which is carried out in formal, non-formal and informal channels. The theory used in this research is the theory of public policy evaluation according to William N Dunn, including effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness and accuracy. The research method used is qualitative. The results of this research show that based on the results of research using William N. Dunn's theory in the Bukit Sion PAUD, Wangkar Weli Village, East Lamba Leda District, East Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province, it can be said that it is still not running optimally due to finding several obstacles in the community empowerment program through Early childhood education is a lack of teaching staff who suit their majors and professional training for PAUD teachers is needed to improve the quality of teaching. Not only that, there is a lack of public awareness of the importance of early childhood education before entering the next level of education and limited facilities and infrastructure owned by PAUD Bukit Sion such as cupboards which are not accessible to children, lack of funds resulting in limitations in purchasing facilities and infrastructure for schools such as : tables, chairs and play equipment

for PAUD children, relatively narrow classrooms so that children have less freedom to carry out activities in the classroom.

Keywords: Program Evaluation, Empowerment, PAUD Education

A. LATAR BELAKANG

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses. Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 12 bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta daya melalui penetapan. Sedangkan pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian lansung pendidikan. Umrotul Khasanah, (2010) pemberdayaan terpadu untuk membangun kemandirian dan pelayanan masyarakat, dengan melihat realitas hasil atau *output* pendidikan yang berkembang saat ini.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Mustanir, A. (2016), kebijakan publik dalam kerangka *substantive* adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapinya. Dengan membawa kebijakan publik kerana upaya pemecahan

masalah publik maka warna administrasi publik akan terasa lebih kental.

Pengertian diatas menekankan bahwa kebijakan publik merupakan upaya yang ditempuh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik, melalui perencanaan manajemen yang baik, maka perusahaan dapat melihat keadaan kedepan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, serta menjabarkan kegiatan dan membuat urutan prioritas utama yang ingin dicapai organisasi. Menurut William N. Dunn (2000: 24), dalam tahapan kebijakan publik terdiri atas penyusunan agenda, formulasi kebijakan, dan adopsi atau legitimasi kebijakan.

2. Teori Evaluasi Kebijakan

Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, yaitu:

- a) Untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang di timbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya.
- b) Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah di tetapkan sebelumnya.

James Anderson membagi evaluasi kebijakan kedalam dua tipe:

- a) Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional yang menyangkut perihal kepentingan (*interest*) dan ideologi dari kebijakan.
- b) Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu.

3. Fungsi-Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi pada umumnya, dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai sesuatu program kegiatan atau proyek.

Informasi ini biasanya berguna untuk pengambilan keputusan, seperti penyempurnaan lebih lanjut dari suatu kegiatan, atau penghentian suatu kegiatan proyek, atau penyebarluasan suatu gagasan yang mendasari suatu kegiatan yang sedang diuji-cobakan.

4. Teori Evaluasi Kebijakan Menurut William N. Dunn

William N. Dunn, memberikan arti pada istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), penilaian (*assessment*), dan kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2003).

5. Teori Pemberdayaan

Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan) Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- a) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, dan bebas dari kesakitan.
- b) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Program pemberdayaan dari program-program yang bersifat *top-down* maupun *crash* program sekali pun untuk menanggulangi kemiskinan berimplikasi kepada kebutuhan metodologi evaluasi yang

khas, yang berbeda dari metodologi untuk kedua sifat program sebelumnya (Greene, 1994).

6. Pendidikan PAUD

Pengertian teori pendidikan adalah teori yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Salah satu penerapan teori belajar yang terkenal adalah teori dari John Dewey yaitu teori "*learning by doing*". Teori belajar ini merupakan sub ordinat dari teori pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga telah menjelaskan bahwa pendidikan adalah tempat atau wadah untuk mengembangkan seluruh potensi diri yang ada pada diri manusia.

C. METODE

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2003) melalui metode ini akan diperoleh data dan informasi tentang gambaran suatu fenomena, fakta, sifat, serta hubungan fenomena tertentu secara komprehensif dan integral dalam (Hutami, 2017). Menurut Husaini dan Purnomo, (2009) pendekatan diskriptif kualitatif merupakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif diartikan dengan kata-kata menurut responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata yang melatarbelakangi. Oleh karena itu penulis berusaha menggambarkan kondisi, situasi yang timbul pada objek sehingga dapat diper oleh sebuah kesimpulan jelas mengenai penelitian yang dimaksud yaitu evaluasi program pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan PAUD (PAUD Bukit Sion di Desa Wangkar Weli, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur)

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai kesamaan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian:

1. Hanny Purnama Sari dan Rachmat Ramdani tentang evaluasi program Badan Usaha Milik Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Karawang tahun 2015.
2. Muhammad Apri dan Muammar Alkadaf mengenai evaluasi program pemberdayaan masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 di Desa Maju Inhil Jaya di Desa Danau Pulau Indah dan Desa Karya Tani Kecamatan Kempas (Kabupaten Indragiri Hilir) tahun 2020.
3. Obaja Karubaba, Frida Purwanti, dan Djoko Suprpto mengenai evaluasi program pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Sarawandori Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua tahun 2014.
4. Ratna Sari Dewi mengenai evaluasi program pemberdayaan masyarakat melalui Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Balonggandu, Kecamatan Jati Sari, Kabupaten Krawang tahun 2016.

Keempat penelitian tersebut mempunyai kesamaan diantaranya:

1. Membahas evaluasi kebijakan dan program pemberdayaan.
2. Program masih minim dalam bidang pemberdayaan masyarakat.
3. Kendala masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia para pelaku implementor program dan masyarakat sasaran program.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 12 bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku kemampuan, kesadaran, serta daya melalui penetapan.

PAUD Bukit Sion Desa Wangkar Weli, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur maka dapat dikatakan belum

berhasil secara optimal dalam pelaksanaannya karena ada dua indikator yang belum berhasil yaitu indikator efektifitas dan perataan seperti kurangnya tenaga pengajar yang sesuai jurusannya dan dibutuhkan pelatihan profesi guru PAUD untuk meningkatkan kualitas dalam mengajar. Pelatihan peningkatan kualitas dalam mengajar terdiri atas sebagian besar guru Paud yang belum memenuhi kualifikasi S1 PG/PAUD, kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya pendidikan anak usia dini sebelum masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya seperti:

- a) Pemahaman masyarakat mengenai definisi dan metode belajar yang benar pada PAUD yang masih rendah sehingga mereka menganggap tidak ada manfaatnya anak di sekolahkan di PAUD, karena hanya berpatok pada pengajaran bernyanyi, tepuk tangan, dan rekreasi.
- b) Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki PAUD Bukit Sion seperti lemari yang digunakan tidak dapat dijangkau anak, kurangnya dana sehingga keterbatasan untuk membeli sarana dan prasarana untuk sekolah, serta ruang kelas yang relatif sempit sehingga anak kurang leluasa dalam melakukan aktivitas di dalam kelas.

2. Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka saran yang diberikan penulis kepada pihak PAUD Bukit Sion Desa Wangkar Weli, Kecamatan Lamba Leda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, diantaranya:

- a) Menambah sarana dan prasarana yang ada di PAUD Bukit Sion yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di PAUD Bukit Sion.
- b) Menambahkan tenaga pengajar yang sesuai dengan jurusannya.
- c) Sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih tertarik lagi atas pentingnya pendidikan anak usia dini.

REFERENSI

- Haeri, Z., & Yunus, M. (2022). Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah pada Sekolah SMA Tunas Daud Mataram Kelas XII NTB. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 70–80.
- Harefa, D., & Telaumbanua, T. (2020). Belajar Berpikir dan Bertindak Secara Praktis Dalam Dunia Pendidikan: Kajian Untuk Akademis. Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri.
- Hasbullah, H., & Anam, S. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Reformasi*, 9(2), 112–122.
- Hiryanto, H. (2017). Pedagogi, Andragogi, Dan Heutagogi Serta Implikasinya Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 22(1), 65–71.
- Zulkifli, R. (2019). Evaluasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Transportasi Online) di Kota Bandung. *Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Ardyansah, A., & Hendra, H. (2018). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bima (Studi pelaksanaan PKH di Kecamatan Monta). *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, 5(1), 128–136.
- Dewi, R. S. (2016). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Desa Balonggandu Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang. *Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus)*, 1(2), 51–72.
- Fitriani, I. D., Zulkarnaen, W., Sadarman, B., & Yuningsih, N. (2020). Evaluasi Kinerja Distribusi Logistik KPU Jawa Barat Sebagai Parameter Sukses Pilkada Serentak 2018. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 244–264.
- Handoko, H., & Wuradji, W. (2015). Evaluasi Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 24–38.
- Irawati, E., & Susetyo, W. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional di Blitar. *Jurnal Supremasi*, 1(1), 3–14.
- Junaidin, J. (2022). Pembelajaran dalam Pandangan Teori Belajar. *Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*, 16(1), 13–30.
- Karubaba, O., Purwanti, F., & Suprpto, D. (2014). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa Sarawandori, Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. *Management of Aquatic Resources Journal (MAQUARES)*, 3(4), 119–124.
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D., & Ruru, J. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48), 243–260.
- Minang, H. P., Digdowiseiso, K., & Sugiyanto, E. (2021). Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Memperdayakan Masyarakat Desa: Studi Kasus Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 42(1), 69–88.
- Pamungkas, A. M. P. (2021). Perkembangan Masyarakat yang Ada Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 249–258.
- Purnamasari, H., & Ramdani, R. (2019). Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

- Desa di Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 4(2), 136–149.
- Rahmat, H. K., Banjarhanor, J., Ma'rufah, N., & Widana, I. D. K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 91–107.
- Rustina, Y., Setiawan, A., Novieastari, E., Wanda, D., Hadi, E. N., Gunawijaya, J., & Falahaini, A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kota Sehat dan Layak Anak Berbasis Kearifan Lokal. *Journal of Community Engagement in Health*, 4(1), 200–207.
- Supriadi, D. (2018). Implementasi Manajemen Inovasi dan Kreatifitas Guru dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 1(2), 125–132.